



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2022

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Danau Aji Nomor 99 Telp. (0541) 661281 Fax 664541 Kode Pos 75512

e-mail : diskopukm@kutaikartanegarakab.go.id

TENGGARON

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabiyullah Rosululloh Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Koperasidan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini merupakan dokumen turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah periode 2021-2026.

Dan pada Tahun 2022 menjadi tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah atau Rencana Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) Tahun 2021-2026

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini.

Demikian dan dengan Izin dan KehendakNya semoga dokumen ini atau dapat memberikan arah yang sinergis, terkoordinasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Tenggarong, Agustus 2021

Kepala Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara



Des. H. TAJUDDIN

NIP. 196404051986031036

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| | |
| BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD | 6 |
| 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD | 10 |
| 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD | 13 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 13 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 22 |
| | |
| BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM | |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi | 24 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD | 25 |
| | |
| BAB IV. RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 27 |
| | |
| BAB V. PENUTUP | 41 |

DAFTAR TABEL

Hal :

| | | |
|-----|--|----|
| 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2020 (T.C 29) | 07 |
| 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM (T-C.30) | 12 |
| 2.3 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 (T.C 31) | 14 |
| 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 (TC 32) | 19 |
| 3.1 | Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 | 22 |
| 4.1 | Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas | 24 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Rencana Kerja Tahunan yang paralel dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan kegiatan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk mencapai keterpaduan Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengacu pada Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dan Pasal 3 ayat (2) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Disebutkan juga dalam Pasal 3 ayat (3) Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu dalam mengimplementasikan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut maka setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD atau sekarang dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Renja SKPD/OPD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD/OPD.

Renja OPD merupakan Dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengopersikan RKPD yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – OPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Pasal 263 bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Kemendagri nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-815/BAPP/V.2/065.11/02/2020, tanggal 13 Februari 2020, tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2020, dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara.

2. Tujuan

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja-PD, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja-PD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan penjabaran dari visi dengan lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dengan uraian program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan / dikemukakan rencana kerja pendanaan program dan kegiatan, indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB V. PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2016-2021;

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan. Maka dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 (T.C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2020

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2021 | |
|--------|--|--|--|--|---|---|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 01.001 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Jasa Pembayaran rekening | 60 | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 60 | 100,00 |
| 01.003 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional | 126 | 40 | 23 | 29 | 126,09 | 34 | 103 | 81,75 |
| 01.006 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK/Paket | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 5 | 100,00 |
| 01.007 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah cetak dan penggandaan | 5 | 3 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 5 | 100,00 |
| 01.010 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bahan / alat logistik kebersihan kantor | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 4 | 100,00 |
| 01.011 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Kotak Makanan dan Minuman | 2.892 | 1.372 | 800 | 800 | 100,00 | 800 | 2972 | 100,00 |
| 01.012 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah | Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 5 | 100,00 |
| 01.013 | Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran | Jumlah jasa Administrasi Teknis Kantor | 60 | 36 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 60 | 100,00 |
| 01.015 | Penyediaan Jasa surat Menyurat | Jumlah lembar jasa surat menyurat yang tersedia | 795 | 390 | 186 | 186 | 100,00 | 186 | 762 | 95,85 |
| 01.016 | Penataan Arsip Perangkat Daerah | Jumlah sarana dan prasarana dan Doku | 4 | - | 4 | 4 | 100,00 | 0 | 4 | 100,00 |
| 01.005 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor | 2 | - | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 2 | 100,00 |
| 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 02.001 | Pengadaan peralatan gedung | Jumlah peralatan gedung kantor | 15 | 12 | 1 | 2 | 200,00 | 2 | 16 | 100,00 |
| 02.002 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin | 8 | 5 | 1 | 1 | 100,00 | 3 | 9 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 02.003 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan | 60 | 36 | 12 | 11 | 91,67 | 2 | 49 | 81,67 |
| 02.004 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung | 48 | 24 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 48 | 100,00 |
| 02.009 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor | 67 | 55 | 2 | 3 | 150,00 | 2 | 60 | 89,55 |
| 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rata-rata nilai kinerja SKP | 84% |
| 05.002 | Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan | 60 | - | 30 | 30 | 100,00 | 30 | 60 | 100,00 |
| 05.003 | Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah | Jumlah laporan Inovasi/Pelaksanaan RB | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 3 | 100,00 |
| 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja | 100% |
| | | Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit; | | | | | | | | |
| | | Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset | | | | | | | | |
| 06.009 | Publikasi Perencanaan Pembangunan | Jumlah event dan publikasi yang diikuti | 6 | 5 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 6 | 100,00 |
| 06.019 | Pengembangan dan Pengelolaan Website | Jumlah Pengembangan dan Website yang dikelola | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 2 | 100,00 |
| 06.020 | Inventarisasi Asset Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Update Data Asset | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 2 | 100,00 |
| 06.021 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev | Jumlah Dokumen Perencanaan | 14 | 4 | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 14 | 100,00 |
| 06.113 | Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Laporan | 2 | - | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 2 | 100,00 |
| 06.114 | Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Laporan | 2 | - | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 2 | 100,00 |
| 19 | Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif | Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru | 500 | 160 | 300 | 200 | 66,67% | 290 | 650 | 100,00 |
| 19.001 | Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif | Jumlah yang dilatih | 180 | - | 90 | 90 | 100,00 | 90 | 180 | 100,00 |
| 19.002 | Pendataan Wirausaha Baru | Jumlah masyarakat miskin usia produktif yang terdata | 400 | - | 200 | 200 | 100,00 | 290 | 490 | 100,00 |
| 18 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Koperasi Melakukan RAT | 31,50% | 30,50% | 31,50% | 31,00% | 31,50% | 31,50% | 31,50% | 100,00% |
| | | Koperasi Berprestasi | | | | | | | | |
| | | Cakupan Bina Koperasi | | | | | | | | |
| 18.001 | Pendampingan dan monev RAT Koperasi | Jumlah Pendampingan dan Evaluasi | 574 | 408 | 140 | 235 | 167,86 | 0 | 643 | 100,00 |
| 18.002 | Fasilitasi Pembubaran Koperasi | Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi | 180 | - | 90 | 157 | 174,44 | 0 | 157 | 87,22 |
| 18.006 | Pengawasan dan Penilaian Koperasi | Jumlah Koperasi yang diawasi dan dinilai | 167 | 95 | 36 | 83 | 230,56 | 0 | 178 | 100,00 |
| 18.009 | Pelatihan Pengurus Koperasi | Jumlah Pengurus Koperasi | 60 | - | 30 | 30 | 100,00 | 30 | 60 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 18.015 | Fasilitasi Pengembangan Koperasi Petani Jagung | yang dilatih Jumlah fasilitasi koperasi petani jagung | 20 | - | 6 | 40 | 666,67 | 0 | 40 | 100,00 |
| 18.019 | Sosialisasi Pemahaman Koperasi | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi | 330 | 240 | 90 | 90 | 100,00 | 0 | 330 | 100,00 |
| 17 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| | | Cakupan Bina Koperasi | | | | | | | | |
| | | Cakupan Bina UMKM | | | | | | | | |
| 17.001 | Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi | Jumlah fasilitasi kerjasama Koperasi | 14 | 7 | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 14 | 100,00 |
| 17.003 | Fasilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan | Jumlah fasilitasi kerjasama permodalan koperasi | 16 | - | 7 | 22 | 314,29 | 0 | 22 | 100,00 |
| 17.006 | Fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi | Jumlah fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi | 76 | - | 50 | 66 | 132,00 | 10 | 76 | 100,00 |
| 17.007 | Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir | Jumlah Koperasi yang di monev | 31 | - | 15 | 31 | 206,67 | 0 | 31 | 100,00 |
| 17.009 | Pengembangan Usaha Koperasi | Jumlah Pengelola Koperasi yang dibina /dilatih | 64 | - | 36 | 64 | 177,78 | 0 | 64 | 100,00 |
| 16 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
| | | Pertumbuhan Usaha Mikro | | | | | | | | |
| 16.001 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK | Jumlah Sentra UMK yang terbentuk | 3 | - | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 3 | 100,00 |
| 16.004 | Pendataan UMK Tani dan Nelayan | Jumlah Laporan/Dok UMK Tani dan Nelayan | 1 | - | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 1 | 100,00 |
| 16.005 | Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan | Jumlah Dokumen | 1 | - | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 1 | 100,00 |
| 16.010 | Pendampingan Penerbitan IUMK | Jumlah Peserta yang mengikuti Pendampingan/ Pertemuan | 255 | - | 180 | 160 | 88,89 | 75 | 235 | 92,16 |

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sasaarn Strategis Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM;
2. Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru;
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
4. Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro

Pada tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melaksanakan 8 Program dengan capaian kinerja Organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 11 Kegiatan yang berisikan kegiatan rutin Perkantoran pada setia Perangkat Daerah, dengan rata-rata capaiannya sebesar **97 %**

2. Cakupan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 5 Kegiatan yang berisikan kegiatan Pengadaan peralatan gedung, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kanto, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, sampai dengan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, capaiannya rata-rata **97,4%**

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 2 Kegiatan Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah dan Pendidikan Pelatian Formal Bagi SDM Aparatur dengan capainnya **100%**

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 6 Kegiatan yang berisikan Publikasi Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Website, Inventarisasi Asset Perangkat Daerah, Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev, Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan rata-rata capaiannya **100%**

5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM ada 7 Kegiatan da nada 3 Kegiatan tidak dilaksanakan adanya situasi Pandemi Covid dan

Rasionalisasi Anggaran/ Kegiatan untuk Program dan Kegiatan yang Prioritas. Dan kegiatan yang dilaksanakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK, Pendataan UMK Tani dan Nelayan, Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan, dan Pendampingan Penerbitan IUMK dengan rata-rata pencapaiannya Program **98%**

6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM ada 7 Kegiatan dan dua kegiatan tidak dilaksanakan karena kondisi Pandemi dan adanya Rasionalisasi Anggaran/Kegiatan, Adapun kegiatan yang dilaksanakan Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi, Fasilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan, Fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir, Pengembangan Usaha Koperasi, dengan rata-rata pencapaiannya **85%**

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ada 9 Kegiatan dan ada 3 Kegiatan yang tidak dilaksanakan, Adapun Keegiatannya Pendampingan dan monev RAT Koperasi, Fasilitasi Pembubaran Koperasi, Pengawasan dan Penilaian Koperasi, Pelatihan Pengurus Koperasi, Fasiltasi Pengembangan Koperasi Petani Jagung, Sosialisasi Pemahaman Koperasi, dengan rata-rata pencapaiannya **100%**

8. Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif

Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif dengan kegiatan utamanya Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif, dan Pendataan Wirausaha Baru dengan tingkat capaiannya **96,67 %**

Capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja, untuk uraian terhadap pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

| NO | Indikator Kinerja | SPM/ Standar nasional | IKK | Target Renstra-PD | | | | | Realisasi Capaian | | | | Catatan Analisis | |
|----------|--|-----------------------------|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 |
| 1 | Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | | 77,79% | 79,76% | 85,86% | 86,36% | 86,86% | n/a | n/a | - | - | 85,86% | Pengukuran Pada tahun 2017 nomenklatur Disprindak op ke Diskop UKM |
| | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | |
| | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik | | | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
| | Persentase Penurunan pelanggaran disiplin | | | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
| | Rata-Rata Nilai Kinerja SKP | | | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | |
| | Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja | | | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
| | Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru | | | n/a | n/a | 280 | 300 | 500 | n/a | n/a | 171 | 290 | 500 | |
| | Cakupan fasilitasi masyarakat miskin usia produktif untuk menjadi wirausaha baru | | | | | 280 | 300 | 500 | - | - | 171 | 290 | 500 | |
| 3 | Persentase Koperasi Aktif | | | 81,13% | 81,23% | 81,33% | 81,43% | 81,53% | 77,13% | 81,30% | 81,85% | 82,11% | 81,53% | |
| | Koperasi Melakukan RAT | | | 28,5% | 29,2% | 30,5% | 31,0% | 31,5% | 28,5% | 29,2% | 30,5% | 31,0% | 31,5% | |
| | Cakupan Bina Koperasi | | | n/a | 2,89% | 3,13% | 3,64% | 5,26% | n/a | 2,89% | 3,13% | 3,64% | 5,26% | |
| 4 | Persentase UMKM yang Naik Kelas | | | 2,33% | 2,84% | 3,06% | 3,28% | 3,60% | 2,89% | 2,84% | 2,97% | 3,23% | 3,60% | |
| | Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro | | | 2,33% | 2,84% | 3,06% | 3,28% | 3,60% | 2,89% | 2,84% | 2,97% | 3,23% | 3,60% | |
| | Pertumbuhan Aset Usaha Mikro | | | 2,33% | 2,84% | 3,06% | 3,28% | 3,60% | 2,89% | 2,84% | 2,97% | 3,23% | 3,60% | |

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan melihat kondisi dari tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu :

- a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP.
- b. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi.
- c. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM.
- d. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM.
- e. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku).
- f. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi.
- g. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan.
- h. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
- i. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
- j. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
- k. Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi KUMKM.
- l. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- m. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Paparan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T.C 31)

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara**

| No | Rancangan Awal RKPd | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----------|---|------------|--|----------------|-------------------|---|------------|--|----------------|-------------------|--------------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Diskop-UKM | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Diskop-UKM | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Diskop-UKM | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja | 4 Dokumen | 289.999.800 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Diskop-UKM | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja | 4 Dokumen | 289.999.800 | Kegiatan Penunjang |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Diskop-UKM | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Diskop-UKM | | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Diskop-UKM | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 8.982.743.077 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Diskop-UKM | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 8.982.743.077 | Kegiatan Penunjang |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Diskop-UKM | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 1 Dokumen | 104.441.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Diskop-UKM | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 1 Dokumen | 104.441.000 | Kegiatan Penunjang |
| 1.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Diskop-UKM | | 1 Dokumen | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Diskop-UKM | | 1 Dokumen | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Diskop-UKM | Jumlah Dokumen Laporan BMD | 1 Dokumen | 93.926.000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Diskop-UKM | Jumlah Dokumen Laporan BMD | 1 Dokumen | 93.926.000 | Kegiatan Penunjang |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|---------------------|-------------|---|------------|---|---------------------|-------------|--------------------|
| 1.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Diskop-UKM | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Diskop-UKM | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Diskop-UKM | Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya bagi Pegawai | 106 Stel | 94.800.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Diskop-UKM | Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya bagi Pegawai | 106 Stel | 94.800.000 | Kegiatan Penunjang |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Diskop-UKM | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 ASN | 50.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Diskop-UKM | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 ASN | 50.000.000 | Kegiatan Penunjang |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Diskop-UKM | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi | 30 ASN | 0 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Diskop-UKM | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi | 30 ASN | 0 | Kegiatan Penunjang |
| 1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Diskop-UKM | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Diskop-UKM | | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Diskop-UKM | Jumlah ATK | 45 Jenis | 70.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Diskop-UKM | Jumlah ATK | 45 Jenis | 70.000.000 | Kegiatan Penunjang |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Diskop-UKM | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor, jumlah porsi makan dan minum | 19 Jenis, 800 porsi | 50.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Diskop-UKM | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor, jumlah porsi makan dan minum | 19 Jenis, 800 porsi | 50.000.000 | Kegiatan Penunjang |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Diskop-UKM | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 7 jenis | 49.999.800 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Diskop-UKM | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 7 jenis | 49.999.800 | Kegiatan Penunjang |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Diskop-UKM | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 205 OH | 230.071.535 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Diskop-UKM | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 205 OH | 230.071.535 | Kegiatan Penunjang |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Diskop-UKM | Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 7 unit | 105.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Diskop-UKM | Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 7 unit | 105.000.000 | Kegiatan Penunjang |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----------------------|-------------|---|------------|---|-----------------------|-------------|--------------------|
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Diskop-UKM | Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Laporan | 0 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Diskop-UKM | Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Laporan | 0 | Kegiatan Penunjang |
| 1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Diskop-UKM | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Diskop-UKM | | | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Diskop-UKM | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35 unit | 142.348.400 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Diskop-UKM | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35 unit | 142.348.400 | Kegiatan Penunjang |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Diskop-UKM | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Diskop-UKM | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Diskop-UKM | Jumlah Materai | 109 lembar | 1.199.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Diskop-UKM | Jumlah Materai | 109 lembar | 1.199.000 | Kegiatan Penunjang |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Diskop-UKM | Jumlah Jasa Pembayaran rekening | 12 bulan (3 rekening) | 152.859.432 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Diskop-UKM | Jumlah Jasa Pembayaran rekening | 12 bulan (3 rekening) | 152.859.432 | Kegiatan Penunjang |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Diskop-UKM | Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 927.982.488 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Diskop-UKM | Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 927.982.488 | Kegiatan Penunjang |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Diskop-UKM | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Diskop-UKM | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Diskop-UKM | Jumlah Kendaraan yang dipelihara | 25 Unit | 180.700.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Diskop-UKM | Jumlah Kendaraan yang dipelihara | 25 Unit | 180.700.000 | Kegiatan Penunjang |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--|---------------------|-------------|--|-----------------|--|---------------------|-------------|--------------------------|
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Diskop-UKM | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20 Unit% | 14.850.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Diskop-UKM | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20 Unit% | 14.850.000 | Kegiatan Penunjang |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Diskop-UKM | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.112 m2 | 285.171.860 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Diskop-UKM | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.112 m2 | 285.171.860 | Kegiatan Penunjang |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Tersebar | Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi | 36 koperasi | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Tersebar | Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi | 36 koperasi | | |
| 2.1 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tersebar | | 36 koperasi | | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tersebar | | 36 koperasi | | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tersebar | Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi | 10 koperasi | 25.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tersebar | Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi | 10 koperasi | 25.000.000 | Tindak Lanjut Temuan BPK |
| 3 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Tersebar | Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi | 375 Koperasi | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Tersebar | Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi | 375 Koperasi | | |
| 3.1 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Tersebar | | 375 Koperasi | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Tersebar | | 375 Koperasi | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------|--|
| | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersebar | Jumlah Pengawasan | 125 koperasi | 150.000.000 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersebar | Jumlah Pengawasan | 125 koperasi | 150.000.000 | |
| | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersebar | Jumlah Pemeriksaan | 150 Koperasi | 150.000.000 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersebar | Jumlah Pemeriksaan | 150 Koperasi | 150.000.000 | |
| 4 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Tersebar | Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya | 70 Koperasi | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Tersebar | Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya | 70 Koperasi | | |
| 4.1 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota | Tersebar | Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian | 53 koperasi | 75.000.000 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota | Tersebar | Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian | 53 koperasi | 75.000.000 | |
| 5 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | |
| 5.1 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 3 wilayah (hulu, tengah, pesisir) | Jumlah pengurus dan pengawas yg dilatih | 90 pengurus dan pengawas | 150.000.000 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 3 wilayah (hulu, tengah, pesisir) | Jumlah pengurus dan pengawas yg dilatih | 90 pengurus dan pengawas | 150.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|--|--------------|-------------|--|-------------|--|--------------|-------------|--|
| 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | |
| 6.1 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Kecamatan | Jumlah pendampingan kelembagaan dan manajemen koperasi | 25 koperasi | 375.000.000 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Kecamatan | Jumlah pendampingan kelembagaan dan manajemen koperasi | 25 koperasi | 375.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | |
| 7.1 | Kegiatan, Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | Kegiatan, Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | |
| | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 4 Kecamatan | 1. Jumlah Sertifikasi Halal | 3 sertifikat | 125.000.000 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 4 Kecamatan | 1. Jumlah Sertifikasi Halal | 3 sertifikat | 125.000.000 | |
| | | | 2. Jumlah Ijin PIRT | 3 ijin PIRT | 125.000.000 | | | 2. Jumlah Ijin PIRT | 3 ijin PIRT | 125.000.000 | |
| | | | 3. Jumlah IUMK Yang Diterbitkan | 100 IUMK | 250.000.000 | | | 3. Jumlah IUMK Yang Diterbitkan | 100 IUMK | 250.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------|-------------|---|--|---|----------------|-------------|---|
| | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 4 Kecamatan, 16 Desa (sanga-Sanga, Muara Jawa, Loa Janan, Tenggarong Seberang) | Jumlah Peserta Pelatihan | 480 Orang | 510.000.000 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 4 Kecamatan, 16 Desa (sanga-Sanga, Muara Jawa, Loa Janan, Tenggarong Seberang) | Jumlah Peserta Pelatihan | 480 Orang | 510.000.000 | |
| | | 4 Kecamatan (Samboja, Muara Wis, Sebulu dan Marang Kayu) | Pelatihan Wirausaha baru | 240 Orang | 310.000.000 | | 4 Kecamatan (Samboja, Muara Wis, Sebulu dan Marang Kayu) | Pelatihan Wirausaha baru | 240 Orang | 310.000.000 | |
| | | 3 Kecamatan (Kota Bangun, Sangasanga, Muara kaman) | Penguatan Kapasitas kelembagaan Usaha Mikro | 3 Unit | 270.000.000 | | 3 Kecamatan (Kota Bangun, Sangasanga, Muara kaman) | Penguatan Kapasitas kelembagaan Usaha Mikro | 3 Unit | 270.000.000 | |
| | Sub Kegiatan, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Tersebar di 4 kec (Tenggarong, Samboja, Marangkayu, Tenggarong sbrng) | Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengakses Permodalan | 160 umkm | 400.000.000 | Sub Kegiatan, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Tersebar di 4 kec (Tenggarong, Samboja, Marangkayu, Tenggarong sbrng) | Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengakses Permodalan | 160 umkm | 400.000.000 | Program Dedikasi (Program Usaha Kecil IDAMAN) |
| | | | Pendampingan pembentukan dan fasilitasi sarana dan prasarana Klinik-Klinik K-UMKM | 1 Klinik KUMKM | 75.000.000 | | | Pendampingan pembentukan dan fasilitasi sarana dan prasarana Klinik-Klinik K-UMKM | 1 Klinik KUMKM | 75.000.000 | Program Dedikasi (Program Usaha Kecil IDAMAN) Sasaran Pembentukan Klinik K-UMKM |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|---------------------------------------|----------|-----------------------|---|--|---------------------------------------|----------|-----------------------|--|
| | | | Jumlah Rakor K-UMKM | 1 Rakor | 75.000.000 | | | Jumlah Rakor K-UMKM | 1 Rakor | 75.000.000 | Program Dedikasi (Program Usaha Kecil IDAMAN) |
| 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | |
| 8.1 | Kegiatan, Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | | | | | Kegiatan, Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | | | | | |
| | Sub Kegiatan, Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Tenggarong | Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi | 120 umkm | 350.000.000 | Sub Kegiatan, Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Tenggarong | Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi | 120 umkm | 350.000.000 | |
| | | Tenggarong, Tenggarong Seberang | Jumlah Kemasan | 300 umkm | 1.865.000.000 | | Tenggarong, Tenggarong Seberang | Jumlah Kemasan | 300 umkm | 1.865.000.000 | Program Dedikasi (Program pembangunan pertanian berbasis kawasan) Sasaran Kemasan Produk |
| | | 1. Kaltim, 2. Penas, 3. Batam 4. Yogya | Jumlah Event yang diikuti | 1 Event | 100.000.000 | | 1. Kaltim, 2. Penas, 3. Batam 4. Yogya | Jumlah Event yang diikuti | 1 Event | 100.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | 17.206.092.392 | TOTAL | | | | 17.206.092.392 | |

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan Program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, ehingga terdapt perbedaan rincian dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, perbedaan terebut pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian Output serta jumlah target kegiatan;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun ini Pembahasan dilakukan terlebih dahulu pengentrian usulan pada Sistem Perencanaan (SIMRAL) sebagai bahan Pembahasan yang kemudian Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM didiskusikan dalam pembahaan Forum OPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pembahaan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan Kesepakatan hasil Musrenbang.

Pada Pembahasan di Forum OPD ada beberapa Program/Kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM diantaranya :

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tersaji dalam Tabe berikut ini.

Tabel 2.4 (TC 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

| NO | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----|---|--|----------------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | |
| | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | | | | |
| | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Tenggarong | Jumlah Pelaku Usaha Yang dilatih | 1 Kecamatan | Fasilitasi Pelatihan IT Pelaku UMKM, Jumlah Usulan, 5 Diterima 4 dan Ditolak 1 diteruskan ke Propinsi |
| | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Tenggarong Seberang | Jumlah Pelaku Usaha Yang dilatih | 1 Kecamatan | Fasilitasi Pelatihan IT Pelaku UMKM, Jumlah Usulan ada 5 akan diteruskan ke Provinsi, Kapasitas Pembiayaan belum mencukupi |
| | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Muara Kaman, Sanga-Sanga, Marang Kayu, Kembang Janggut, Muara Jawa, Marang Kayu, Muara Muntai, | Jumlah Pelaku Usaha Yang dilatih | 7 Kecamatan | Fasilitasi Pelatihan IT Pelaku UMKM, Jumlah Usulan ada 5 Iakan diteruskan ke Provinsi, Kapasitas Pembiayaan belum mencukupi |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|---|--|-------------|--|
| | Kegiatan, Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | | | | |
| | Sub Kegiatan, Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Tenggarong Seberang, Tenggarong | Jumlah Pelaku Usaha Yang dilatih | 2 Kecamatan | Fasilitas Pelatihan Desain Kemasan Pelaku Usaha, Jumlah Usulan Diterima ada 4 |
| | Sub Kegiatan, Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Marang Kayu, Sanga Sanga, Samboja, Kembang Janggut, Loa Kulu, Muara Kaman | Jumlah Pelaku Usaha Yang dilatih | 6 Kecamatan | Fasilitas Pelatihan Desain Kemasan Pelaku Usaha, Jumlah Usulan Ditolak ada 8 |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | |
| | Kegiatan, Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | Fasilitas Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Dalam Mengakses Permodalan | | |
| | Sub Kegiatan, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Tenggarong Seberang | Fasilitas Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Dalam Mengakses Permodalan | 1 Kecamatan | Jumlah Usulan, Diterima dan Ditolak dan diteruskan ke Propinsi |
| 4 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | |
| | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Tenggarong Seberang, Sanga Sanga, Muara Jawa, Kembang Janggut, | jumlah yg dilatih | 4 Kecamatan | Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pengurus dan Pengawas Koperasi, Jumlah Usulan, 4 Diterima |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kembang Janggut | jumlah yg dilatih | 1 Kecamatan | Ditolak, Bukan Kewenangan Dinas Koperasi dan UKM |

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOPERASI DAN UKM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah membawa perubahan sistem Pemerintahan Indonesia yang sentralistis ke arah desentralistik.

Dan bila dikaitkan dengan Urusan di Bidang Koperasi dan UKM maka Pemberdayaan Koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka pertuasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekatipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UKM :

Kebijakan Nasional Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang berdaulat, mandiri, dan maju dengan Fokus Kontribusi PDB sector Koperasi, Mewujudkan Koperasi Model Baru dan Modern, Pertumbuhan Stat-Up berbasis Koperasi;
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang berdaulat mampu bersaing di Pasar Domestik dan Global dengan Focus, Kontribusi PDB di sector UMKM, Nilai Ekspor UMKM, Nilai Investrasi UMKM, UKM Naik Kelas, Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM, Rasio Kewirausahaan;

Kebijakan Propinsi Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :

Meningkatkan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM, melalui Sumbangan Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB dengan focus menciptakan Koperasi Unggulan, dan UKM Unggulan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih dengan Fokus Pembangunan Tahun 2022 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diuraikan Tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Tujuan Kedua, Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM dengan Fokus Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro dan koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi Produksi, Informasi, dan pemasaran;

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu 5 (lima) tahun.

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakn secara operasional dengan memperhatikan, ketersediaan sumber daya organisasi.

3.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut

1. Sasaran Pertama, *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM;*
2. Sasaran Kedua, *Mempertahankan Jumlah Koperasi Aktif, dengan indicator Persentase Koperasi Aktif;*
3. Sasaran Ketiga, *Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha, dengan Indikator Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha;*
4. Sasaran Keempat, *Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi, Indikatornya Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi*

Tabel 3. 1

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara 2022

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | Satuan | Kondisi Awal | INDIKATOR | | | | |
|----|--|---|--|------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UMKM | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM | Predikat Akuntabilitas Kinerja | Persentase | 67.76 | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| 2 | Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM | Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya | Persentase | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% | 19% |
| | | | Persentase Koperasi yang Aktif | Persentase | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| | | | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | Persentase | 12% | 12,57% | 12,75% | 12,93% | 13,11% | 13,28% |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Fokus / Tema Pembangunan Kutai Kartanegara “Memperkuat Landasan Bagi Percepatan (Akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Berbasis Potensi Kewilayahan dan Komoditi Unggulan Daerah;
2. Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia, dengan Misi Kepala Daerah terpilih :



Dalam Rencana Kerja Tahun 2022 ini Dinas Koperasi memperhatikan berbagai Regulasi dan memastikan Sinkronisasi Substansi dan Proses dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2022

| KODE | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|----------|---|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Diskop-UKM | 100% | 11.826.092.392 | | | | 12.995.716.201 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | Diskop-UKM | 4 Dok | 289.999.800 | Apbd | | | 290.000.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | Diskop-UKM | 1 Dokumen | 100.000.000 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 1 Dokumen | 100.000.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja | Diskop-UKM | 3 Dokumen | 189.999.800 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 3 Dokumen | 190.000.000 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel | Diskop-UKM | | 9.087.184.077 | Apbd | | | 9.745.843.453 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Diskop-UKM | 12 bulan | 8.982.743.077 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 12 bulan | 9.641.402.453 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | Diskop-UKM | 1 Dokumen | 104.441.000 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 1 Dokumen | 104.441.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi | Diskop-UKM | 1 Dokumen | 93.926.000 | Apbd | | 1 Dokumen | 93.926.000 |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan BMD | Diskop-UKM | 1 Dokumen | 93.926.000 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 1 Dokumen | 93.926.000 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Diskop-UKM | | 144.800.000 | Apbd | | | 210.000.000 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya bagi Pegawai | Diskop-UKM | 106 Stel | 94.800.000 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 100 Stel | 110.000.000 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Diskop-UKM | 30 ASN | 50.000.000 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 30 Orang | 50.000.000 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Peserta yang mengikluti Sosialisasi | Diskop-UKM | 30 ASN | - | Apbd | Kegiatan Penunjang | 1 Inovasi | 50.000.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | Diskop-UKM | | 505.071.335 | Apbd | | | 605.104.000 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ATK | Diskop-UKM | 45 Jenis | 70.000.000 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 45 | 70.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Diskop-UKM | 19 Jenis, 800 Porsi | 50.000.000 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 19 | 50.000.000 |
| | | Jumlah Porsi Makan dan Minum | | | | | | 800 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Diskop-UKM | 7 Jenis | 49.999.800 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 9 | 50.000.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Diskop-UKM | 205 OH | 230.071.535 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 223 | 250.064.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Sarana dan prasarana Arsip pada SKPD | Diskop-UKM | 7 Unit | 105.000.000 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 7 | 135.040.000 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Diskop-UKM | 1 Laporan | - | Apbd | Kegiatan Penunjang | 1 | 50.000.000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | Diskop-UKM | 100% | 142.348.400 | Apbd | | 2 Paket/Jenis | 407.238.400 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Diskop-UKM | 35 unit | 142.348.400 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 204 unit | 407.238.400 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | Diskop-UKM | | 1.082.040.920 | Apbd | | | 1.147.732.488 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai | Diskop-UKM | 109 Lembar | 1.199.000 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 500 | 5.000.000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Pembayaran rekening | Diskop-UKM | 12 bulan (3 Rekening) | 152.859.432 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 12 bulan | 200.000.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Diskop-UKM | 12 bulan | 927.982.488 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 12 bulan | 942.732.488 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Diskop-UKM | 100% | 480.721.860 | Apbd | | | 495.871.860 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan yang dipelihara | Diskop-UKM | 25 unit | 180.700.000 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 25 | 180.700.000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Diskop-UKM | 20 unit | 14.850.000 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 30 | 30.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Diskop-UKM | 1.112 M2 | 285.171.860 | Apbd | Kegiatan Penunjang | 1100 M2 | 285.171.860 |
| 2 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase pemeriksaan dan pengawasan | | 59,90% | 300.000.000 | | | 67% | 450.000.000 |
| 1.1 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi | Tersebar | 275 Koperasi | 300.000.000 | Apbd | | 425 Koperasi | 450.000.000 |
| 1.1.1 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan | Tersebar | 125 Koperasi | 150.000.000 | Apbd | | 150 koperasi | 175.000.000 |
| 1.1.2 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pemeriksaan | Tersebar | 150 Koperasi | 150.000.000 | Apbd | | 275 koperasi | 275.000.000 |
| 3 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya | | 51,85% | 75.000.000 | | | 15% | 210.000.000 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------------------------------|----------------------|-------------|------|-----------------------|-------------|
| 2.1 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota | Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP | Tersebar | 70 Koperasi | 75.000.000 | Apbd | 180 Koperasi | 210.000.000 |
| 2.1.1 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/kota | Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian | Tersebar | 53 koperasi | 75.000.000 | Apbd | 75 koperasi | 120.000.000 |
| 2.1.2 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota | Jumlah penghargaan koperasi | Tersebar | 0 | - | Apbd | 65 koperasi | 90.000.000 |
| 3 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Koperasi | Tersebar | 60 koperasi 9,58% | 150.000.000 | | 60 koperasi 19,17% | 300.000.000 |
| 3.1 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota | Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | 3 wilayah (hulu, tengah, pesisir) | 60 koperasi | 150.000.000 | Apbd | 60 koperasi | 300.000.000 |
| 3.1.1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Peserta yang dilatih Perkoperasian | 3 wilayah (hulu, tengah, pesisir) | 90 orang | 150.000.000 | Apbd | 180 orang | 300.000.000 |
| 4 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi | 18 Kecamatan | 61% | 25.000.000 | | 70% | 25.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--|----------|-------------|-------------|------|--|-------------|-------------|
| 1.1 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi | Tersebar | 100% | 25.000.000 | Apbd | | 100% | 25.000.000 |
| 1.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi | Tersebar | 10 Koperasi | 25.000.000 | Apbd | | 10 Koperasi | 25.000.000 |
| 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi | | 7% | 375.000.000 | | | 10% | 400.000.000 |
| 2.1. | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Tersebar | 25 koperasi | 375.000.000 | | | 66 koperasi | 400.000.000 |
| 2.1.1 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi pendampingan kelembagaan dan manajemen koperasi | Tersebar | 25 koperasi | 375.000.000 | Apbd | | 60 koperasi | 400.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|--------------|---------------|------|------------------------------|--------------|---------------|
| 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Pemberdayaan UMKM | | 1,75% | 2.140.000.000 | | | 0,85% | 3.730.000.000 |
| | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Pemberdayaan UMKM | | 75% | 2.140.000.000 | Apbd | | 80% | 3.730.000.000 |
| | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Pendampingan | | | | | | 600 | 1.000.000.000 |
| | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 1. Jumlah Sertifikasi Halal | 4 Kecamatan | 3 sertifikat | 125.000.000 | Apbd | | 3 sertifikat | 125.000.000 |
| 2. Jumlah Ijin PIRT | | 3 ijin PIRT | | 125.000.000 | 3 ijin PIRT | | | 125.000.000 | |
| 3. Jumlah IUMK Yang Diterbitkan | | 100 IUMK | | 250.000.000 | 100 IUMK | | | 250.000.000 | |
| | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Peserta Pelatihan | 4 Kecamatan, 16 Desa (sanga-Sanga, Muara Jawa, Loa Janan, Tenggarong Seberang) | 480 Orang | 510.000.000 | Apbd | Program Dedikasi, Kemiskinan | 480 Orang | 510.000.000 |
| | | Pelatihan Wirausaha baru | 4 Kecamatan (Samboja, Muara Wis, Sebulu dan Marang Kayu) | 240 Orang | 310.000.000 | Apbd | | 240 Orang | 310.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|----------------------|-------------|--|-----------------|----------------------|
| | | Penguatan Kapasitas kelembagaan Usaha Mikro | 3 Kecamatan (Kota Bangun, Sangasanga, Muarakaman) | 3 Unit | 270.000.000 | Apbd | | 3 Unit | 285.000.000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengakses Permodalan | Kab. Kutai Kartanegara | 160 umkm | 400.000.000 | | | 160 umkm | 400.000.000 |
| | | Pendampingan Pembentukan dan Fasilitasi Sarana Prasarana Klinik Klinik K-UMKM | Loa Kulu | 1 Klinik KUMKM | 75.000.000 | | Program Dedikasi Usaha Kecil IDAMAN (Misi 3) | 6 Klinik | 400.000.000 |
| | | Jumlah Rakor K-UMKM | Tenggarong | 1 Rakor | 75.000.000 | | Program Dedikasi Usaha Kecil IDAMAN (Misi 3) | 2 Rakor | 325.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Pengembangan UMKM | | 4,58% | 2.315.000.000 | | | 0,01% | 2.050.000.000 |
| | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas | | 1 Pelaku | 2.315.000.000 | Apbd | | 1 Pelaku | 2.050.000.000 |
| | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi | Tenggarong, Tenggarong Seberang | 120 umkm | 350.000.000 | Apbd | Program Dedikasi BKDH | 120 umkm | 350.000.000 |
| | | Jumlah Kemasan | UMKM | 300 UMKM | 1.865.000.000 | | Program Dedikasi BKDH | 200 UMKM | 1.200.000.000 |

| | Jumlah Event yang diikuti | Penas | 1 Event | Apbd | 4 Event |
|--|---------------------------|-------|-----------------------|------|-----------------------|
| | | | 100.000.000 | | 500.000.000 |
| | JUMLAH | | 17.206.092.392 | | 20.160.716.201 |

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM dibuat yang berdasarkan dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomo 12-197/Bapp/IV.2/065.11/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2022;

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Fokus / Tema Pembangunan Kutai Kartanegara "Memperkuat Landasan Bagi Percepatan (Akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Berbasis Potensi Kewilayahan dan Komoditi Unggulan Daerah dan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia,

Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih tersebut telah tergambar kedalam program kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Perangkat Daerah;

Akhir kata apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan ini akan kami lakukan perbaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku, kritik dan saran sangat kami harapkan, terimakasih atas bantuan dari berbagai pihak;

Tenggarong, Agustus 2021,
Kepala Dinas

Drs. TAJUDDIN
NIP. 196404051986031036